
HUBUNGAN KEKUASAAN DENGAN BUDAYA POLITIK DI KEPULAUAN RIAU

Sapariah¹ Wenny Wulan Safitri² Sarmila³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Univeristas Maritime Raja Ali Haji, Tanjungpinang
email: shyafariahshyafa350@gmail.com, wennywulansafitri05@gmail.com, mila87458@gmail.com3

ABSTRAK

Kata Kunci: Aktivitas politik selalu berkaitan dalam kegiatan interaksi warga negara dengan pemerintah dan insitusi lain selain pemerintah, kekuasaan pemerintah berhubungan dengan budaya politik yang sudah tertanam sejak lama di suatu daerah. Penelitian ini menjelaskan hubungan kekuasaan dengan budaya Melayu di Pemerintahan Kepulauan Riau. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data-data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan sumber internet. Dalam penerapannya pada sistem pemerintahan Kepulauan Riau saat ini, relasi kekuasaan terhadap budaya melayu adalah dengan mengikutsertakan semua komponen dalam pemerintahan, demi lancarnya kegiatan pembangunan masyarakat daerah.

Budaya Melayu,
Hubungan
Kekuasaan,
Politik.

ABSTRACT

Political activities is always related to the interaction activities of citizens with the government and other institutions other than the government, government power is related to the political culture that has been embedded for a long time in a region. This research explains the relationship of power with Malay culture in the Riau Islands Government. The research method used in this paper is qualitative descriptive using secondary data from books, journals, articles, and internet sources. In its application to the current Riau Islands government system, the power relationship to Malay culture is to include all components in the government, for the smooth running of regional community development activities.

Keywords:
Malay
Culture,
Power
Relations,
Politics

PENDAHULUAN

Setiap individu dalam masyarakat dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan aspek-aspek politik praktis yang memiliki simbol dan yang tidak memiliki simbol. Pelaksanaannya pun dapat terjadi secara tidak langsung maupun langsung. Masyarakat dapat memperoleh berita informasi mengenai kejadian politik yang terjadi secara tidak langsung. Sedangkan secara langsung, masyarakat terlibat dalam peristiwa politik yang terjadi tersebut. Aktivitas politik merupakan salah satu bagian dari kehidupan dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintah telah membentuk adanya variasi opini, pengetahuan dan pandangan mengenai perilaku politik di segala sistem politik (Yusuf, 2016). Aktivitas politik selalu berkaitan dengan tujuan dari semua masyarakat, bukan dari tujuan pribadi. Konsep dalam politik adalah negara, pengambilan keputusan, kebijakan dan alokasi (Budiardjo, 1981). Negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi sah di suatu wilayah serta ditaati oleh rakyat. Kekuasaan merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi individu atau kelompok lain sesuai keinginan dari pelaku. Keputusan merupakan suatu pilihan dari beberapa pilihan alternatif. Pengambilan keputusan mengacu pada proses dimana keputusan tersebut dibuat, dalam konsep politik menyangkut keputusan secara kolektif dan mengikat rakyat,

yang bertujuan untuk kebijakan pemerintah. Kebijakan merupakan kumpulan dari keputusan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Pembagian alokasi merupakan pembagian nilai dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang dianggap benar dan baik, memiliki harga, dapat bersifat abstrak dan konkrit (Budiardjo, 1981). Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sangat heterogen, dengan cakupan wilayah yang sangat banyak, dapat dipastikan terdapat variasi dalam budaya politik setiap daerah masing-masing. Budaya politik adalah elemen dari kebudayaan masyarakat yang memiliki ciri khas. Budaya politik merupakan istilah yang meliputi pengaturan kekuasaan, masalah legitimasi, pembuatan kebijakan, kegiatan partai, perilaku aparat, dan gejolak masyarakat pada kekuasaan pemerintah. Budaya politik memengaruhi aktivitas politik dan menentukan keputusan yang berkaitan dengan pola alokasi sumber-sumber masyarakat. Budaya politik diorientasikan dengan sistem politik, artinya budaya politik tidak bisa lepas dari sistem politik. Bentuk budaya politik sendiri di dalam masyarakat selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sejarah perkembangan sistem, konsep kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya (Riyanto, 2006). Pola kepemimpinan juga bagian dari budaya politik, yang mendorong aktivitas atau menuntut konformitas. Di negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, pemerintah diharapkan memiliki peran besar dalam pembangunan di semua bidang. Dari perspektif penguasa, konformitas merujuk pada tuntutan atau harapan akan dukungan dari rakyatnya. Jika pemimpin merasa dirinya penting maka ia akan menuntut rakyat menunjukkan kesetiannya yang tinggi. Namun, beberapa penguasa menyadari inisiatif rakyat akan menentukan pembangunan, sehingga penguasa akan mengembangkan pola kepemimpinan inisiatif dengan tidak mengekang kebebasan yang dimiliki rakyat. Kuatnya pemerintahan diikuti oleh rakyat yang pasif pada umumnya memiliki budaya politik yang memiliki sifat agama politik. Artinya, politik dikembangkan mengacu pada ciri-ciri agama yang memiliki kecenderungan mengatur dengan ketat anggota masyarakatnya. Budaya ini adalah usaha mencampurkan politik dengan keagamaan yang kuat dari masyarakat di negara berkembang. (Apter, 1987) Budaya politik penguasa berdasarkan budaya politik agama dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena rakyat harus melakukan penyesuaian diri terhadap kebijakan para penguasa politik. Sehingga pada penulisan ini akan dijabarkan mengenai pengaruh arti hubungan kekuasaan budaya Melayu terhadap sistem kekuasaan pemerintah Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan publikasi-publikasi terkait yang diterbitkan di internet. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode mengumpulkan data pustaka, mencatat dan membaca serta mengolah data penelitian (Zed, 2004). Penulisan ini akan mengarah pada analisis hubungan nilai kekuasaan budaya Melayu Kepulauan Riau melalui penjelasan nilai kekuasaan terhadap sistem politik pemerintahan Kepulauan Riau. Teori yang digunakan antara lain teori kekuasaan, budaya politik, serta sistem pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data-data sekunder dari buku, jurnal, artikel, dan sumber internet. Metode ini menggunakan metode kualitatif, yang mana dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini, peneliti langsung seperti alat peneliti utama yaitu melakukan penelitian secara langsung dalam wawancara, mengumpulkan berbagai materi, atau bahan yang berkaitan dengan potensi dan peluang, juga hambatan objek wisata pantai karangsong yang dapat memberikan pengembangan suatu objek wisata yang kemudian dianalisis dengan analisis SWOT. Pengolahan data terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pencarian data, wawancara, pengumpulan, dokumentasi dan analisis data. Alur pengolahan jurnal ini dengan mengunjungi langsung ketempat lokasi penelitian dengan mencari beberapa sumber untuk diwawancarai kemudian hasilnya dianalisis (Iskandar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan politik merupakan kemampuan seseorang atau kelompok memanfaatkan sumber kekuatan yang dapat mendukung sektor kuasanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Hidayat, 2009). Beberapa jenis kekuasaan yang diketahui umumnya dibagi menjadi: (a) kekuasaan eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif yang membuat dan mengesahkan perundang-undangan serta mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif dalam penyelesaian hukum yang didukung kepolisian untuk menjamin pelaksanaan hukum. Di dalam masyarakat sendiri pasti terdapat relasi kekuasaan baik antara penguasa, antara masyarakat, atau antara penguasa dan masyarakat (Ishak, 2013).

Aktivitas politik selalu berkaitan dalam kegiatan interaksi warga negara dengan pemerintah dan insitusi lain selain pemerintah. Hal ini juga menghasilkan variasi opini dan pengetahuan mengenai praktik perilaku politik. Maka dari itu, individu dapat mengukur dan melihat pengetahuan, perasaan, dan sikap masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpinnya.

Bangsa Indonesia sejak lama dalam perjalanannya menunjukkan terdapat pengaruh signifikan dari budaya Melayu, yang juga membentuk identitas dan jati diri negara Indonesia. Pengaruh budaya melayu kepada negara Indonesia mencakup banyak hal, tak terkecuali bidang politik. Kitab mahakarya budaya politik peradaban Melayu karangan Bukhari Al Jauhari memberikan pemikiran penting untuk pembentukan tradisi dan budaya politik Melayu dengan syarat-syarat menjadi Raja.

Mengacu pada budaya politik Melayu, ada sepuluh sifat raja atau pemerintah yang baik, antara lain (Yusri & Aprizal, 2013):

- a. Dapat membedakan mana yang baik dan benar
- b. Berilmu
- c. Dapat memilih menteri dan pembantunya dengan benar
- d. Baik rupa dan memiliki budi pekerti supaya dikasihi dan dihormati rakyat
- e. Pemurah
- f. Menghargai jasa orang lain atau balas budi
- g. Berani; apabila berani maka pengikutnya juga akan ikut berani
- h. Cukup dalam makan dan tidur agar tidak lalai
- i. Mengurangi atau tidak melakukan foya-foya dan tidak “bermain” perempuan
- j. Laki-laki

Budaya politik Melayu juga mengenal adanya pola relasi raja dengan rakyat. Etika penguasa Melayu turun dari konsep-konsep Islam karena Islam adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Melayu. Islam identik dengan identitas dan karakter Melayu yang kuat hingga saat ini. Nuansa agamis mewarnai pola pemerintahan dalam budaya Melayu.

Budaya melayu dalam hubungannya dengan konsep kekuasaan adalah tentang sebuah amanah. Pemimpin yang memegang teguh amanah dan tanggung jawab akan kekuasaan akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan dan masyarakat. Begitu pentingnya arti kepemimpinan dalam budaya Melayu. Hal ini berlaku pada keseharian pemerintahan, yang tak terlepas dari tata pemerintahan itu sendiri. Tata pemerintahan mencakup penggunaan wewenang politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan negara di segala tingkatan. Tata pemerintahan meliputi semua mekanisme, proses dan lembaga dimana masyarakat dapat mengutarakan kepentingan mereka dengan

menggunakan hak hukum dan memenuhi kewajiban serta menjembatani perbedaan yang ada dalam masyarakat. (Yusri & Aprizal, 2013) Karakteristik dari tata pemerintahan yang baik antara lain:

a. Mengikutsertakan semua komponen terkait.

Pemerintah yang baik dalam mengemban aktivitas pemerintahannya harus didukung oleh semua bagian yang berada dalam sistem pemerintahan tersebut, sesuai dengan teori sistem yang dikemukakan Manheim bahwa dalam sistem terdiri dari subsistem yang saling berafiliasi serta mempengaruhi, sebagai akibatnya bila ada kerusakan pada subsistem akan mempengaruhi kerja sistem secara holistik. Dalam konteks pemerintahan Kepulauan Riau, sudah dilakukan musyawarah ditingkat Kabupaten atau Kota serta Provinsi untuk menampung aspirasi warga dalam memilih pembangunan daerah.

b. Transparan dan bertanggungjawab.

Dalam menjalankan sistem pemerintahan yang modern di Kepulauan Riau, pelaksanaan pemerintahan harus terbuka dan transparan serta dapat mempertanggungjawabkan hal terkait penggunaan dana kepada masyarakat. Mengenai hubungan kekuasaan di sistem pemerintahan Kepulauan Riau terhadap budaya melayu, penyelenggaraan pemerintahan bersifat terbuka dan siap dikritik masyarakat secara langsung.

c. Efektif dan Adil.

Hubungan kekuasaan budaya melayu terhadap sistem pemerintahan tercemrin dalam pemerintahan yang efektif dan adil. Pemerintahan yang adil mampu memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya. Meskipun arti adil tidak dapat disamaratakan, APBD Kepulauan Riau yang didukung berbagai sumber daya yang dimiliki cukup mampu mengurangi angka kemiskinan.

d. Menjamin prioritas politik, sosial, dan ekonomi sesuai konsensus masyarakat. Menurut kekuasaan budaya Melayu pemerintahan harus mengikutsertakan masyarakat dalam prioritas pemerintahan untuk membangun kebijakan. Meskipun terdapat benturan keinginan masyarakat dengan pemerintah, namun konsesus masyarakat dan pemerintah tetap diperhatikan.

e. Menjamin adanya supremasi hukum.

Kebudayaan melayu menginginkan pemerintahan yang menjamin penegakkan hukum bagi semua lapisan atau kalangan masyarakat. Keinginan ini sejalan dengan tujuan dibangunnya pemerintahan dalam negara yang berdemokrasi, yakni menjamin penegakkan hukum masyarakat agar semua kalangan masyarakat berada pada kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta tidak ada masyarakat yang kebal terhadap hukum. Berdasarkan hal tersebut, dalam konteks pemerintahan Kepulauan Riau, telah dilaksanakan penegakkan supremasi hukum yang diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat. Sehingga aktivitas pemerintahan memiliki kekuasaan yang terbatas dan tidak bisa melakukan perbuatan semena-mena karena telah menaati aturan hukum.

f. Memerhatikan kepentingan yang lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan Dalam budaya melayu dijelaskan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang selalu mementingkan kepentingan rakyatnya yang paling lemah dan miskin. Di pemerintahan indonesia secara keseluruhan, secara ideal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya alam mengutamakan kepentingan masyarakat kecil. Meskipun begitu, dalam penerapannya sering kali tidak sesuai, berbenturan dengan harapan masyarakat.

KESIMPULAN

Kriteria penguasa sebagai motor kekuasaan dari budaya melayu mengacu pada agama Islam, antara lain hendaknya laki-laki, memiliki pembicaraan dan pendengaran baik, adil, dan sebagainya. Dalam penerapannya pada sistem pemerintahan Kepulauan Riau saat ini, relasi kekuasaan terhadap budaya melayu adalah dengan mengikutsertakan semua komponen dalam pemerintahan, demi lancarnya kegiatan pembangunan masyarakat daerah.

BIBLIOGRAFI

- Apter, D. E. (1987). Politik Modernisasi. Jakarta: Gramedia. Budiardjo, M. (1981). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Duverger, M. (1998). Sosiologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hidayat, I. (2009). Teori-Teori Politik. Malang: SETARA press.
- Zed, M. (2004). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ishak. (2013). Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat MelayuRiau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Riyanto, A. (2006). Budaya Politik Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
- Yusri, A., & Aprizal. (2013). Relasi Kekuasaan Dalam Budaya Melayu Riau. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah.
- Yusuf, M. (2016). Perkembangan Budaya Politik Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu.